



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**



30 November 2017

Nomor : UND/ 557 /PJK.02.07/01-33/11/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Undangan Pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017

**Kepada Yth.  
Bapak/Ibu terlampir  
di tempat**

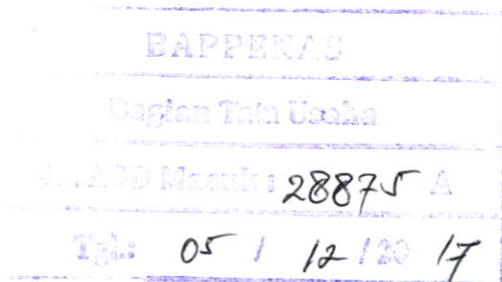
Dalam rangka merayakan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017. Kegiatan HAKORDIA ini mengusung tema **"Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera"**. Rangkaian kegiatan ini akan diawali dengan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Ke-12.

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan mengenai upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan. Pada tahun ini konferensi akan mengusung tema **"Komitmen Nasional dalam Menindaklanjuti Hasil Review Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir dalam Pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 dan kegiatan KNPK ke-12 yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/11 Desember 2017  
Waktu : Pukul 08.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Birawa, Hotel Bidakara,  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan

Melalui surat ini kami juga melampirkan susunan acara terkait materi yang akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Demikian kami sampaikan dan untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ika Yuniarti pada nomor telepon 081284340498 dan email: [ika.yuniarti@pactoconvex.com](mailto:ika.yuniarti@pactoconvex.com) atau Sdri. Miranti Martin pada nomor telepon 087770128473 dan email: [miranti.martin@kpk.go.id](mailto:miranti.martin@kpk.go.id). Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Plt. Deputi Bidang PIPM KPK

**Lampiran I**

Nomor : UND/557/PJK.02.07/01-33/11/2017

Tanggal : 30 November 2017

**Daftar Undangan Pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 dan  
Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017  
Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta – Senin, 11 Desember 2017**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- 1. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI**
  - Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI
  - Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam RI
- 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI**
  - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
- 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI**
  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
- 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI**
  - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI

**KEMENTERIAN**

- 1. Kementerian Sekretariat Negara RI**
  - Menteri Sekretaris Negara RI
- 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara RI (Bappenas)**
  - Menteri Bappenas RI
  - Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
  - Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan u.p. Direktur Hukum dan Regulasi
- 3. Kementerian Luar Negeri RI**
  - Menteri Luar Negeri RI
  - Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral u.p. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
  - Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional u.p. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan
- 4. Kementerian Keuangan RI**
  - Menteri Keuangan RI
  - Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara
  - Direktur Jenderal Bea Cukai
  - Direktur Jenderal Pajak
  - Direktur Jenderal Anggaran
  - Sekretaris Jenderal



**5. Kementerian Dalam Negeri RI**

- Menteri Dalam Negeri RI
- Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama
- Inspektur Jenderal

**6. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI**

- Menteri Hukum dan HAM RI
- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum u.p. Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional & Direktur Perdata
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

**7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI**

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

**8. Kementerian Pertahanan RI**

- Menteri Pertahanan RI

**9. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

- Menteri Komunikasi dan Informatika RI

**10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI**

- Menteri Badan Usaha Milik Negara RI

**11. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI**

- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

**12. Kementerian Perindustrian RI**

- Menteri Perindustrian RI

**13. Kementerian Perdagangan RI**

- Menteri Perdagangan RI

**14. Kementerian Pertanian RI**

- Menteri Pertanian RI

**15. Kementerian Ketenagakerjaan RI**

- Menteri Ketenagakerjaan RI

**16. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI**

- Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI

**17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

**18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI (Kepala BPN)**

- Menteri Agraria dan Tata Ruang RI (Kepala BPN)

**19. Kementerian Agama RI**

- Menteri Agama RI

**20. Kementerian Kesehatan RI**

- Menteri Kesehatan RI

**21. Kementerian Sosial RI**

- Menteri Sosial RI

**22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI**

- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

**23. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI